

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R. (2023, Juli 20). Bicara Kerawanan Luar Biasa Soal Netralitas ASN, Lolly: Tiga UU Tegas Sebut Harus Netral. Retrieved from [bawaslu: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bicara-kerawanan-luar-biasa-soal-netralitas-asn-lolly-tiga-uu-tegas-sebut-harus-netral](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bicara-kerawanan-luar-biasa-soal-netralitas-asn-lolly-tiga-uu-tegas-sebut-harus-netral)
- Firnas, M. A. (2011). EVALUASI REFORMASI BIROKRASI : MASALAH POLITISASI BIROKRASI . Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 5, No.2,, 20-35.
- HARTOTO, D. S. (2004, Maret 30). Pejabat politik dan pejabat birokrasi :: Studi pola hubungan penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah . Diambil kembali dari repository.ugm.ac.id: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/26893>
- Kurniawan, O. (2023, Oktober 6). Menghindari Cinta Terlarang Birokrat dan Politisi Jelang Pemilu. Retrieved from LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI: <https://lan.go.id/?P=15077>
- Kurniawan, P. (2019, November 7). Timlo.net. Retrieved from Pilkada Sukoharjo Rawan Politisasi Birokrasi: <https://timlo.net/baca/69803/pilkada-sukoharjo-rawan-politisasi-birokrasi/>
- Lamabelawa, M. (2020). JARINGAN SOSIAL DAN MOBILISASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN. VOL 2 NO 1 (2020): BUNGA RAMPAI TATA KELOLA PEMILU INDONESIA (RINGKASAN TESIS TATA KELOLA PEMILU) EDISI 2 TEMA PROSES PEMILU TAHUN 2020, 32-34.
- Martini, R. (2010). POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA. POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP, 3-12.
- Prof. Dr. Miftah Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik di Indonesai. Jakarta: rajagrafindo Persada.
- PURNAMASARI, D. D. (2020, Agustus 26). Perkuat Penegakan Aturan Netralitas, KASN Kerja Sama Lintas Instansi. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/08/26/perkuat-penegakan-aturan-netralitas-kasn-kerja-sama-lintas-instansi>
- Rizki Muharlin Rayadi dan Drs. Erman M, M. (2014). POLITISASI BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH . Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3-10.
- Rt. Ta'sya Ismaya Putri, S. N. (2017). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. Ejournal3.undip.ac.id, 7.
- BUKU (Rt. Ta'sya Ismaya Putri, 2017)
- Ambo Radde Junaid, L. O. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. Journal of Lex Generalis (JLS), 1763.
- Prof. Dr. Miftah Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik di Indonesai. Jakarta: rajagrafindo Persada.
- (Ambo Radde Junaid, 2021)

- Ambo Radde Junaid, L. O. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1763.
- Rizki Muharlin Rayadi dan Drs. Erman M, M. (2014). POLITISASI BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH . *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3-10.
- Rt. Ta'sya Ismaya Putri, S. N. (2017). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. *Ejournal3.undip.ac.id*, 7.
- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. Doi:10.1080/14672715.2014.960706
- Ajie, M. (2018). Birokrasi Menurut Max Weber. *Teori Birokrasi Menurut Max Weber*, 5-6.
- Fadoli, E. D. (2012). DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1942-1950. 31-34.
- Nuraida Mokhsen, S. D. (2018). *PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA*. Jakarta Selatan: Bidang Pengkajian dan Pengembangan KASN .
- Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo. (2017). *Geografis Kabupaten Sukoharjo*. Retrieved from <https://portal.sukoharjokab.go.id/geografis/>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Sleman : CV Budi Utama .
- Sukoharjo, B. K. (2022, Maret 9). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgwIzI=/jumlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Sukoharjo, B. K. (n.d.). Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo 2023. *Infografis Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Wicaksono, R. B. (2020, Desember 7). *Guru PNS di Sukoharjo Dimutasi Tanpa Alasan Jelang Pilkada 2020, Kenapa?* Retrieved from Espos Indonesia: <https://solopos.espos.id/guru-pns-di-sukoharjo-dimutasi-tanpa-alasan-jelang-pilkada-2020-kenapa-1095969>
- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. doi:10.1080/14672715.2014.960706
- Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Sadikin, H. (2021). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)

- Gunanto, D. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 87-94
- Pratama, W. Y., & Baihaq, M. A. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 517-534.
- Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259-272.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15-28
- Sukoharjo, K. K. (2020). *KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020*. Kabupaten Sukoharjo: KPU Kabupaten Sukoharjo.
- Fernando, H., Natalia, D., Ochtawiaji, F., Arianti, L., & Fitriyan, S. (2024). Eksistensi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan Pemilihan Umum. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 181-190.
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam PILKADA Untuk Mewujudkan Good Governance. *Syntax Idea*, 5(12), 2242-2252.
- Rosiana, B. R. (2012). Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta Tahun 1945-1950.
- Nomor, P. P. (42). Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. *Jhony Fredy Hahury, Efektifitas Pembinaan Pegawai*, 169.
- Prasadana, M. A. F., & Gunawan, H. (2019). Keruntuhan Birokrasi Tradisional Di Kasunanan Surakarta. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2), 187-200.
- Asbudi, A. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.
- Dharmaningtias, D. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. *Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu aktual dan strategis*, 12.
- Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 449-466.
- Mokhsen, N. (2019). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Komisi Aparatur Sipil Negara, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem.
- Trisetiawan, A. (2020, November 13). *Adu Visi Misi EA dan Joswi di Pilkada Sukoharjo 2020, Reformasi Birokrasi vs Kemandirian Pemerintah*. Retrieved from Tribun Solo: <https://solo.tribunnews.com/2020/11/13/adu->

visi-misi-ea-dan-joswi-di-pilkada-sukoharjo-2020reformasi-birokrasi-vs-kemandirian-pemerintah?page=2#google_vignette
Wicaksono, R. B. (2020, Desember 7). *Guru PNS di Sukoharjo Dimutasi Tanpa Alasan Jelang Pilkada 2020, Kenapa?* Retrieved from Espos Indonesia: <https://solopos.espos.id/guru-pns-di-sukoharjo-dimutasi-tanpa-alasan-jelang-pilkada-2020-kenapa-1095969>.

Peraturan dan Undang-Undang :

- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pusat statistik nomor 3 tahun 2019 tentang kode dan Nama wilayah tahun 2019
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020